

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pendidikan terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang diharapkan dan unggul, proses pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki.

Zakiah Darajat mengemukakan tujuan mulia pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti.¹ Marimba menjelaskan tujuan akhir dari pendidikan Islam ialah terbentuknya kepribadian Muslim.² Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan dapat diusahakan oleh manusia tetapi penilai tertinggi mengenai hasilnya adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sesungguhnya tujuan pendidikan Islam, adalah identik dengan tujuan hidup setiap orang Muslim. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Bumi Aksara, 2008), 29-30.

² Kepribadian Muslim dijelaskan oleh Marimba dalam bukunya *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya yakni baik tingkahlaku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaan menunjukkan pengabdian diri kepada Tuhan (Allah) penyerahan diri kepada-Nya. Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: al-Maarif, 1962), 68.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).

Jelaslah bahwa tujuan hidup manusia menurut agama Islam ialah: untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepada-Nya (Muslim). Penyerahan diri (Islam) jalin-berjalin dengan memeluk agama Islam.³

Namun, mengapa bila kita lihat insan-insan yang terdidik di negeri ini masih banyak perilakunya yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalnya tindak korupsi yang ternyata dilakukan oleh pjabat yang notabenenya orang-orang berpendidikan. Belum lagi tindak kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi di negeri ini seperti anarkis, bahkan pembunuhan. Keadaan yang memprihatinkan sebagaimana tersebut ditambah lagi dengan sebagian remaja Indonesia (pelajar) yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai remaja yang terdidik. Misalnya tawuran antar pelajar, tersangkut jaringan narkoba, baik sebagai pengedar maupun pemakai, atau melakukan tindak asusila.

Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴ Zuhairini sebagaimana yang dikutip

³ Ibid., 46-48.

⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, 19.

oleh Hasan Basri⁵ mengemukakan pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal,⁶ tetapi juga bersifat nonformal.⁷ Secara substansial, pendidikan tidak sebatas pengembangan intelektual manusia, artinya tidak hanya meningkatkan kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. makna pendidikan yang lebih hakiki lagi adalah pembinaan akhlak manusia guna memiliki kecerdasan membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.⁸

Untuk membentuk manusia yang mulia dan bangsa yang bermartabat upaya perbaikan harus segera dilakukan. Karena pendidikan model lama menganggap peserta didik sebagai *gentong* yang diisi semuanya oleh pendidik, atau yang oleh Paulo Friere dikatakan dengan sistem bank. Hal ini perlu diganti dengan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan rakyat (*empowering of people*).⁹ Untuk itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan (Islam) dituntut harus dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan

⁵ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 54.

⁶ Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2).

⁷ Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3).

⁸ Moh. Yamin memberikan gambaran, pendidikan adalah media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (pencerahan). Pendidikan bertujuan membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 15.

⁹H.A.R.Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 145-146.

peserta didik, bukan memaksa mereka untuk tunduk dan patuh terhadap keinginan pendidik. Karena mendidik yang sesuai dengan keinginan peserta didik akan lebih berhasil ketimbang mendidik yang sesuai dengan keinginan pendidik.

Tampaknya model pendidikan sebagaimana yang diharapkan tersebut di atas belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini bisa dilihat dari proses pendidikan yang berlangsung. Selama ini, guru selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling pintar, menang sendiri, paling berhak memperlakukan peserta didik sesuai dengan kemauannya.¹⁰

Pendidikan dan kekuasaan adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisahkan, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara memberikan dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara. Hubungan tersebut adalah realitas empirik yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.¹¹

¹⁰Ismail SM, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 135.

¹¹M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia memang tidak bisa terlepas dari *knowledge and power* (pengetahuan dan kuasa). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Dengan kata lain *transfer of knowledge and transfer of value* menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah dalam hal ini, memiliki tugas suci sebagai penentu kebijakan. Sehingga jika seseorang ingin megabdikan diri dengan maksimal maka jalan yang paling ideal adalah masuk pada struktural pemerintahan¹² karena dalam hal ini seseorang bisa menjadi pengendali dan penentu kebijakan yang diorientasikan pada perkembangan serta kesejahteraan masyarakat. Tugas yang menjadi penting karena berimplikasi pada nilai kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan ini bisa tercederai dengan ekspektasi sosial yang negatife dan ini dapat dilihat dari kecenderungan pada sikap *anomali* (ketidak normalan) seperti: tawuran antar pelajar, hilangnya rasa solidaritas, kekerasan dan lain sebagainya. Dalam konteks yang lain, standart tingkah laku seseorang yang merupakan pengejawantahan dari nilai kemanusiaan dapat dilihat dari perspektif budaya¹³, akal¹⁴ dan ajaran¹⁵ yang itu memiliki produk

¹²Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar FISIP UNAIR, Prof. Dr. Kacung Marijan dalam workshop “*Pendewasaan Berdemokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat*” yang diadakan oleh Lembaga Bina Pemuda, pada tanggal: 6 Oktober 2012 di gedung Ansor, Jawa Timur.

¹³Standart penilaian tingkah laku yang dilihat dari perspektif budaya dapat juga disebut dengan moral. Dalam hal ini, bagi setiap individu yang melanggar kebiasaan masyarakat maka dapat diklaim bahwa orang tersebut abnormal atau menyalahi aturan.

¹⁴Standart penilaian tingkah laku yang dilihat dari perspektif akal dapat juga disebut dengan etika. Dalam hal ini, bagi setiap individu yang melakukan perbuatan buruk menurut akal dapat diklaim bahwa dia menyalahi aturan.

aturan dan formulasi tersendiri serta efek yang ditimbulkan dari perbuatan buruk tersebut juga berbeda-beda.

Dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah lebih bertendensi pada sistem kelas dan diorientasikan pada korporasi pendidikan¹⁶. Seolah-olah lembaga pendidikan mengabaikan anak cerdas yang kurang mampu (pintar-miskin) dari pada anak bodoh yang mampu (bodoh-kaya).¹⁷ Hal seperti ini yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia karena hak dalam pendidikan belum sepenuhnya bisa difasilitasi oleh pemerintah.

Dalam rentang sejarah kemerdekaan Indonesia, setelah Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 di bom oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keadaan demikian berpengaruh kepada kekuatan balatentara Jepang di Indonesia. Momen demikian sangat kondusif bagi bangsa Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan, dimana puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini

¹⁵Yang dimaksud dengan ajaran disini adalah ajaran Islam, jika setiap umat Islam melanggar ajaran yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist nabi maka mereka dapat dikatakan menyalahi aturan. Standar penilaiin tingkah laku dalam perspektif ajaran islam ini dapat disebut dengan akhlak.

¹⁶Korporasi pendidikan ialah prosesi pendidikan yang berusaha dimanfaatkan oleh para elit pengampu kebijakan dengan cara mencari keuntungan demi kebutuhan hidupnya. Korporasi pendidikan muncul akibat dari sistem kapitalisme di era modern ini.

¹⁷Hal senada juga disampaikan oleh Darmaningtias dalam bukunya pendidikan rusak-rusakan, beliau menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan rintangan besar bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak pendidikan mereka.

mengakhiri masa pendudukan Jepang dan pada saat yang sama mengawali bangkitnya pendidikan nasional.¹⁸

Dengan kondisi negara Indonesia yang masih dalam transisi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka sudah menjadi barang tentu jika kondisi seperti ini pemerintah memfokuskan perbaikan dalam bidang militer. Serta perubahan sistem kenegaraan yang terlalu membabibuta seperti pada 18 Agustus 1945 – 14 November 1945 sistem pemerintahan presidensial¹⁹ yang diterapkan oleh negara Indonesia.

Kemudian tanggal 14 November 1945 – 27 Desember 1949 berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer²⁰ yang ini berefek terhadap dinamika dalam dunia pendidikan, kemudian 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, sistem pemerintahan pada masa ini menurut konstitusi RIS²¹ dan tidak lama kemudian berubah lagi sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD S yaitu pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 dengan alasan bahwa RIS bukan merupakan bentuk negara yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian, setelah terjadi gejolak politik yang ini mengancam eksistensi dari negara Indonesia, maka Presiden mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dengan maksud mengembalikan kembali sistem

¹⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), 54.

¹⁹ Sistem pemerintahan presidensial memberikan kesempatan besar kepada Presiden untuk lebih intens dalam mengurus negaranya karena selain berkedudukan sebagai kepala negara, Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.

²⁰ Sistem pemerintahan parlementer terdapat pembagian kerja oleh pemimpin negara dalam hal ini Presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.

²¹ Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS ini berawal dari konferensi yang berlangsung di Den Haag mulai tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 yang diberi nama Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan salah satu hasil kesepakatan bahwa didirikan negara Indonesia Serikat.

pemerintahan yang sering berganti menjadi sistem pemerintahan seperti semula yaitu presidensial.²²

Pendidikan nasional pasca kemerdekaan rakyat Indonesia, yakni masa awal kemerdekaan (1945-1965), tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial-politik yang ada. Karenanya transisi kebijakan pendidikan nasional pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya, yaitu: *Fase pertama*; sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1950, *Fase kedua*; dari fase akhir pertama sampai dikeluarkannya dekrit presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa demokrasi liberal atau parlementer (1951-1959 M), sedangkan *Fase ketiga*; dari akhir fase kedua sampai berakhirnya masa demokrasi terpimpin (1959-1965 M). Keseluruhan fase tersebut tergolong dalam orde lama (1945-1965 M)²³

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena kondisi sosial-politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai dan disana-sini terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama orde lama sering terjadi pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara 1945-1959 M, kabinet di Indonesia rata-rata berumur 7-8 bulan.²⁴

²²Saifudin Azis, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta : Sinar Mandiri, 2006), 7-13.

²³ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, 54.

²⁴ Ibid., 54-55.

Perubahan sistem pemerintahan ini berimplikasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam.

Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa orde lama mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam, ini terbukti bahwa pemerintah membentuk departemen agama²⁵ sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam.

Terkait dengan perkembangan pendidikan Islam di masa awal berdirinya negara Indonesia, penulis menganggap penting untuk mengkaji ini dari sisi demokrasi pendidikan islam. Sehingga sisi yang selama ini menjadi penting dan tidak terungkap akan berusaha penulis kaji dengan orientasi yang mendalam.

Dalam pembahasan masalah demokrasi pendidikan penulis mengangkat isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh. Sehingga bisa menunjuk kepada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-

²⁵ Departemen agama adalah untuk bagian dari aparatur pemerintah negara republik indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama.

peraturan²⁶ yang ini masih dalam rangkaian sistem pendidikan islam menurut pemikiran K. H. Wahid Hasyim. Dengan berimplikasi pada arah dan tujuan pendidikan, secara umum merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan.

Demokrasi pendidikan merupakan hal yang urgen untuk dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat secara politis merupakan perjuangan politik menuju transformasi sosial. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan bagian dari agenda pendidikan kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan. Manakala pendidikan telah terbebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan, itu berarti demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan.

Apalagi tokoh yang diambil dalam penelitian ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan keberadaannya membawa dampak yang sangat besar dalam mengarahkan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih mapan. Maka dari itu penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah; PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM K.H. ABDUL WAHID HASYIM.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Supaya penelitian ini menjawab fokus inti serta tidak memunculkan bias, maka penulis membatasi masalah pada:

²⁶Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), 3.

1. Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang pendidikan Islam.
2. Relevansi pemikiran pendidikan Islam K.H. Abdul Wahid Hasyim dengan pendidikan masa kini

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Untuk itu, sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana dijabarkan di atas, maka masalah penelitian ini berusaha menjawab persoalan tentang:

1. Bagaimana Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang pendidikan Islam?
2. Bagaimana relevansi pemikiran pendidikan Islam K.H. Abdul Wahid Hasyim dengan pendidikan masa kini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan poin rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang pendidikan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi pemikiran pendidikan Islam K.H. Wahid Hasyim dengan pendidikan masa kini.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pembangunan dan peningkatan khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam di Indonesia.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penambahan karya ilmiah perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam menganalisis wacana tentang Pendidikan Islam.
3. Secara Umum, penelitian ini semoga berguna sebagai wacana pemikiran terhadap pendidikan Islam di Indonesia tentang persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Pendidikan adalah rancangan kegiatan yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan masyarakat. Pendidikan merupakan model rekayasa sosial yang paling efektif untuk menyiapkan suatu bentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dan bisa menghadapi tantangan. Oleh karena itu, konsep penyusunan pendidikan Islam secara benar akan merupakan sumbangan yang cukup berarti tidak saja bagi penyiapan suatu tata kehidupan umat Islam, akan tetapi juga bagi penyiapan masyarakat bangsa dimasa depan secara lebih baik. Namun, suatu konsep

pendidikan Islam yang menjanjikan masa depan seperti tersebut di atas tampaknya sulit kita temukan di lapangan. Usaha untuk merumuskan konsep pendidikan Islam sebagaimana yang dimaksud diatas ternyata tidak mudah dan selalu ada hambatan untuk melaksanakannya.

Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim hambatan tersebut ialah tumbuhnya suatu “Ideologi Ilmiah”. Ideologi ilmiah inilah yang kemudian mengontrol dan mengawasi secara ketat seluruh aktifitas pendidikan dan juga dakwah Islam. Hal ini tampak pada aktivitas pendidikan Islam sebagai semacam indoktrinasi pendidik sehingga peserta didik berpendapat, berpikir dan bertindak sebagaimana si pendidik. Menurut Fazlur Rahman, adanya perdebatan ideologi ilmiah merupakan situasi dilematis dan kontroversial yang tidak saja menjauhkan Muslim dari ilmu, akan tetapi juga dari Al-Qur’an. Akibatnya, potensi pemikiran kritis dari peserta didik yang seharusnya menjadi orientasi utama proses belajar-mengajar tidak berkembang.

Pendidikan Islam seharusnya dapat memperhatikan potensi yang ada pada diri masing-masing peserta didik untuk dikembangkan dan akhirnya dapat menjadi generasi yang mempunyai kualitas pribadi yang kritis, kreatif dan mandiri ditengah perubahan sosial yang semakin panas dan penuh dengan tantangan. Sehingga nantinya akan terjadi proses humanisasi dalam pendidikan Islam dan bukannya dehumanisasi (meminjam istilah Paolo Freire).

Karena itu, pendidikan bagi K.H. Abdul Wahid Hasyim harus difokuskan pada tumbuhnya kepintaran anak yaitu kepribadian yang sadar diri yang merupakan pangkal dari kecerdasan kreatif, dengan harapan manusia bisa

terus berkembang mandiri ditengah perubahan sosial dan bisa memahami serta memecahkan persoalan yang dihadapinya. Melihat kondisi yang demikian, maka harus ada penyusunan kembali konsep pendidikan Islam secara benar yang akan memberi sumbangan yang cukup berarti tidak saja bagi penyiapan suatu tata kehidupan umat Islam, akan tetapi juga bagi penyiapan masyarakat bangsa dimasa depan secara lebih baik. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam yang diharapkan dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, harus ada pengkajian ulang terhadap ajaran pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam sebagai proses sosialisasi dan aktualisasi ajaran Islam selalu aktual dan dapat diterima oleh semua orang di sepanjang zaman. Agar ajaran agama Islam itu tetap aktual, menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim, haruslah ajaran yang bisa memberi peluang partisipasi seluruh manusia dalam penafsiran ajaran agama itu secara berbeda sesuai dengan kapasitas intelektual masing-masing baik karena bawaan ataupun karena kondisi sosial yang ada. Ajaran Islam harus dapat memahami realitas kehidupan yang ada disekelilingnya. Apa yang telah ditetapkan menjadi hukum Islam pada masa lalu belum tentu cocok dengan kehidupan pada masa kini atau setidak-tidaknya benar dalam cakupan waktu dan kerangka sosial tertentu dan tidak benar dalam cakupan waktu dan kerangka sosial yang lain. Hal ini di karenakan realitas sosial yang dialami oleh umat Islam terdahulu dengan umat Islam yang sekarang sangatlah berbeda. Disinilah perlunya reaktualisasi ajaran Islam tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab kajian kepustakaan ini, tesis yang berjudul *Pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdul Wahid Hasyim*, fokus pada dua pembahasan pertama adalah kajian kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim diberbagai pemikirannya.

Penelitian yang membahas tentang pemikiran K.H. Adul Wahid Hasyim penulis menemukan beberapa diantaranya adalah:

1. *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, karya Abu Bakar Atjeh. Buku setebal 975 halaman ini diterbitkan dalam rangka mengenang sosok mantan Menteri Agama itu. Selain mengupas biografi, perjuangan, dan pandangan-pandangannya, buku ini juga memuat kumpulan tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim yang sebelumnya tercecer di berbagai media. Dengan masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, buku ini memiliki bobot khusus untuk dijadikan sebagai referensi primer dalam penelitian ini.
2. *K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914-1953) His Educational and Religious Thought*. Tesis yang ditulis oleh Miftah Adebayo Olowokofayoku Uthman untuk meraih gelar Master Arts membedah pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim di bidang pendidikan dan keagamaan.
3. *K.H. Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) Wawasan Keislaman dan Kebangsaan*. Tesis ini ditulis oleh Moch. Choirul Arif Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tesis ini membicarakan

tentang wawasan keislaman dan kebangsaan dari Wahid Hasyim yang dikenal sebagai Muslim Tradisional.

4. Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif K.H. Abdul Wahid Hasyim dan Relevansinya Pada Kondisi Sekarang. Skripsi yang ditulis Rijal Mumazziq Z. Menghasilkan kesimpulan dalam K.H. Abdul Wahid Hasyim bisa dikategorikan seorang substansialis, mengenai relasi agama dan negara adalah simbiosis mutualistik. Relevansi pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang relasi agama dan negara terletak pada upayanya membuat peranan agama dan negara secara seimbang, saling memberi dan melengkapi.
5. Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim Tentang Nasionalisme Dalam Konteks Fiqih Siyasah. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Fathul Chodir adalah dalam pemikiran nasionalismenya K.H. Abdul Wahid Hasyim beranggapan bahwa nasionalisme bisa disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks fiqih siyasah, K.H. Abdul Wahid Hasyim masuk dalam tipologi pemikir Islam yang substansialis, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sunni.
6. Perjuangan dan Peranan Dakwah K.H. A. Wahid Hasyim. Skripsi ini ditulis oleh Siti Maulihatun Jamilah untuk memenuhi gelar sarjana dalam ilmu dakwah di IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini lebih konsentrasi pada pelaksanaan perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam skripsi ini dijelaskan Wahid

Hasyim selain sebagai seorang pemimpin bangsa dia juga seorang dai yang ulung.

7. Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam menurut K.H. Abdul wahid hasyim. Skripsi ini ditulis oleh Rangga Sa'dillah untuk memenuhi gelar sarjana dalam program Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini lebih menekankan pendidikan karakter yang diperoleh dari pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim sangat kompleks. Itu terbukti dengan beberapa penelitian yang mengkaji tentang pemikirannya. Sebut saja pemikirannya tentang Islam, pendidikan Islam, politik dan wawasan kebangsaan. Itu semua adalah beberapa sisi yang dibedah dari putera pendiri organisasi Islam terbesar di Negeri ini. Namun, ketika penulis amati, ada satu sisi yang belum terurai dari karya-karya di atas, terutama tentang pendidikan Islam terutama di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya dan mencoba mendeskripsikannya dalam tesis ini.

H. Definisi Operasional

Pendidikan²⁷ Islam²⁸: Pembentukan kepribadian muslim.²⁹ Darajat menjelaskan, yang dimaksud Pendidikan Islam merupakan usaha berupa

²⁷ Pendidikan: proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lihat Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000), 263.

²⁸ Islam: agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah S.W.T.

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.³⁰

Pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim: Pemikiran berarti sudut pandang; pandangan³¹, penilaian KH. Abdul Wahid Hasyim terhadap Pendidikan Islam.

I. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, mengolah dan menganalisis data, maka langkah-langkah yang harus dijelaskan terkait dengan hal-hal teknis dalam metodologi penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Berpacu pada term penelitian kepustakaan sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.³² Melihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif,³³ yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan

²⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008), 28.

³⁰ *Ibid.*, 86.

³¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000), 864.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

³³ Sugiyono menjelaskan penelitian kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah untuk meneliti sejarah perkembangan kehidupan seorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif.

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bercorak historis – faktual³⁵ karena mengarah pada pengambilan kebijakan masa lalu. Serta deskriptif - analisis³⁶ yaitu dengan memberikan gambaran secara utuh tentang kebijakan politik pendidikan Islam. kemudian dianalisis berdasarkan konsep prinsip – prinsip politik pendidikan Islam di Indonesia.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer yaitu data yang langsung dan segera dapat diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk bertujuan yang khusus.³⁷ Atau dengan kata lain data ini meliputi bahan yang langsung berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, seperti: buku Achmad Zaini, yang berjudul “K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam”, buku karya Aboebakar Atjeh, yang berjudul “Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar”. Serta buku yang ditulis oleh Mohammad Rifa’i yang judul “Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953”.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2007), 60.

³⁵ Anton Barker, *Metode–Metode Filsafat* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), 136.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-7, 198.

³⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 163.

b. Sumber Sekunder

Data yang dimaksud adalah berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari pada penelitian ini, bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer.³⁸ Data ini berupa buku-buku, artikel, dan naskah yang berisi tentang hal-hal yang dengan permasalahan yang diajukan oleh penulis. Serta secara fungsional berguna untuk menunjang kelengkapan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, prasasti, rapat, leger, dan penelitian ini bersifat kepustakaan.

Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh peneliti sebagai upaya menyelaraskan metode dokumenter tersebut, antara lain:

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literature - literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu membuat catatan data yang berkenaan dengan penelitian.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 53.

- c. *Editing*, yaitu memeriksa validitas data secara cermat mulai dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.
- d. Untuk keseluruhan data yang diperlukan agar tekumpul, maka tindakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan maksud mengorganisasikan data.³⁹ kemudian proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dalam berbagai sumber.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan instrumen analisis deduktif dan *content analysis* atau analisa isi. Dengan menggunakan analisis deduktif, langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum yang kemudian ditarik keranah khusus atau kesimpulan yang pasti.⁴¹

Content analysis penulis pergunakan dalam pengolahan data dalam pemilahan pembahasan dari beberapa gagasan atau yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikelompokan dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya penulis pergunakan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), Cet. Ke- 7, 103.

⁴⁰Ibid., 193.

⁴¹Cholid Narbuko dan AbuAhmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke – 10, 18.

Maksud penulis dalam penggunaan teknik *content analysis* ialah untuk mempertajam maksud dan inti data-data, sehingga secara langsung memberikan ringkasan pada tentang fokus utama pola kebijakan politik pendidikan Islam, analisis ini penting untuk dijadikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh melebar dari fokus inti pembahasan.⁴²

J. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini selaras dengan fokus bidang kajian, maka dibutuhkan sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

Bab pertama pendahuluan. yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian teori, yang membahas tentang ; pendidikan Islam yang mencakup dasar, sejarah, filsafat pendidikan Islam, dan reorientasi pendidikan Islam.

Bab ketiga membahas tentang profil dari K.H. Abdul Wahid Hasyim. Dan menjelaskan sejarahnya sejak masa kanak-kanak sampai menjadi orang yang berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia dan karier intelektualnya, karya-karyanya, serta pemikirannya.

⁴² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 68.

Bab keempat membahas tentang pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang pendidikan Islam, relevansi pemikiran pendidikan Islam K.H. Abdul Wahid Hasyim yang memuat tentang; problematika pendidikan Islam dan kontekstualisasi konsep pendidikan Islam K.H. Abdul Wahid Hasyim dengan pendidikan masa kini.

Bab ke lima tentang penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.